

## Target Renstra Jalan Tol Sulit Tercapai

SANUR – Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan target rencana strategis pembangunan jalan tol 2010-2014 sangat sulit dicapai. Sulitnya proses pembebasan lahan masih menjadi kendala utama.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengungkapkan, target renstra jalan tol dibangun sepanjang 120 kilometer (km) hingga 2014, dan saat ini jalan bebas hambatan baru terbangun 43 km, atau masih kurang 77 km.

“Namun dari hasil kajian ulang, renstra jalan bebas hambatan yang bisa dibangun hanya sepanjang 59 km. Dengan demikian, hingga akhir 2014 kekurangan pembangunan jalan sekitar 16 km saja,” kata dia dalam acara Konsultasi Regional (Konreg) II Kementerian Pekerjaan Umum, di Sanur, Bali, Rabu (20/3).

Dia menyebutkan, proyek tol yang diharapkan bisa tuntas pada 2014 di antaranya adalah tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, tol Solo-Kertosono, tol akses Tanjung Priok, dan tol Medan-Kualanamu.

Menurut dia, untuk merealisasikan pembangunan jalan tol sesuai renstra diperlukan kerja keras, terutama dalam proses pengadaan lahan. Karena itu, kata dia, akan dilakukan peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengadaan lahan untuk proyek jalan tol maupun jalan nasional.

“Di samping itu, dokumen lelang akan disiapkan pada Oktober 2013, sehingga pada November proyek sudah bisa dilelang,” papar dia.



Djoko Murjanto

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengakui, pembangunan jalan tol mendapatkan rapor merah dibandingkan kegiatan infrastruktur lainnya, baik jalan tol yang dibangun pemerintah maupun badan usaha jalan tol (BUJT). Hal itu karena pembangunan jalan bebas hambatan amat terkendala oleh proses pengadaan lahan.

Kendala dalam proses pengadaan lahan ini tidak saja terjadi pada pembangunan jalan tol, tetapi juga jalan nasional maupun waduk. Karena itu, proses pembebasan lahan untuk infrastruktur ini membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.

“Kepala dinas maupun kepala Bappeda yang hadir dalam konreg ini, tolong sampaikan kepada kepala dae-

rah bahwa pembangunan jalan perlu dukungan,” ujar dia.

Djoko Murjanto menambahkan, ada beberapa ruas tol yang masuk dalam tol Trans-Jawa yang dinilai sulit diselesaikan sesuai target. Ruas tol itu adalah Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang.

“Tiga ruas tol itu sudah diprediksi akan sulit untuk diselesaikan karena masalah tanah,” papar dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah mempunyai dua opsi untuk mempercepat proses pengadaan lahan. Opsi tersebut adalah menggunakan Undang-Undang No 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum atau penerapan aturan lama UU No 36/2005 hingga 2014.

Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum akan menjadikan ruas tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) II rute Cimanggis-Cibitung sebagai *pilot project* penerapan UU No 2/2012. Langkah tersebut tengah dimatangkan pemerintah sebelum diajukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Pembangunan jalan tol tersebut dinilai sudah siap dari sisi perencanaan. Namun, sampai saat ini Pemprov Jawa Barat belum menetapkan lokasi pembangunan tol tersebut.

“Jika surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) sudah diterbitkan dan disosialisasikan kepada masyarakat, kami siap membebaskan lahannya sesuai undang-undang yang baru,” kata Djoko Murjanto baru-baru ini. (ean)